

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sejarah merupakan proses enkulturasi dalam rangka *nation-building*, dan proses pelembagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai heroisme dan nasionalisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa (Wertstch, 2000: 40-41; Morton, 2000: 59; Kartodirdjo, 1999: 33). Nilai-nilai tersebut diharapkan berkembang pada tingkat individu maupun kolektif bangsa dan tercermin dalam etos budaya bangsa. Beberapa sejarawan terkemuka seperti Cicero (Lucey, 1984: 15) menyatakan bahwa sejarah adalah “cahaya kebenaran, saksi waktu, guru kehidupan”: *Historia Magistra Vitae*. Barzun (1974: 131) menyatakan bahwa peran sejarah itu “menggempleng jiwa manusia menjadi kuat” dan “tahan menghadapi teror serta kekacauan” dalam kehidupan. Langlois dan Seignobos (Kartodirdjo, 1992: 21), kemudian mengemukakan bahwa sejarah mempunyai pengaruh higienis terhadap jiwa kita karena membebaskan dari sifat yang serba percaya belaka.

Pengertian “menggempleng jiwa menjadi kuat” dan “tahan menghadapi teror”, maupun “mempunyai pengaruh higienis” terhadap jiwa kita, sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh yang dibangun oleh berbagai pembiasaan belajar sejarah terutama melalui berpikir kritis. Garvey dan Krug dalam bukunya berjudul *Model of History Teaching in the Secondary School* mencoba mengaitkan betapa pentingnya berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah, bahwa salah satu nilai penting belajar sejarah adalah; “... to acquire the ability to evaluate and criticize historical writing” (Garvey dan Krug, 1977: 2). Garvey dan Krug pada bagian lain menjelaskan: “*This critical sense*

*can be used in the learning history, and through history it can be sharpened into a valuable intellectual tool...History it can contribute to intellectual development through the honing of a critical ability and its application to academic study”.*

Nash dan Crabtree (1996) dalam *National Standard for History* juga mengemukakan pentingnya berpikir kritis ini dalam belajar sejarah, hanya saja oleh mereka diperluas sehingga diperlukan pengembangan keterampilan sejarah. Mereka lebih jauh mengemukakan bahwa antara pemahaman, kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sejarah merupakan kualitas standar yang harus dikuasai oleh setiap siswa yang belajar sejarah. Gardner (1985) maupun Wineburg (2001;44) menyebutnya sebagai *cognitive revolution*. Suatu perubahan paradigma belajar sejarah dari pendekatan *collective memory* ke *disciplinary* bahkan *postmodern* (Seixas, 2000: 20). Hasan (1999: 9) menyimpulkan bahwa ada pergeseran dalam filsafat pendidikan sejarah dari *perennialism* yang menekankan “*transmission of the glorious past*” ke arah suatu posisi di mana berbagai aliran filsafat seperti *essentialism* bahkan *social reconstructionism* bergabung terlebur di dalamnya.

Pendidikan sejarah, yang bersifat eklektik tersebut tidak saja menjadi wahana pengembangan kemampuan intelektual dan kebanggaan masa lampau, tetapi juga merupakan wahana upaya memperbaiki kehidupan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Pendidikan sejarah juga memiliki nilai praktis-pragmatis bagi siswa, tidak sekedar nilai-nilai teoritik-idealisme konseptual. Sebagai konsekuensi logis dari pergeseran filsafat pembelajaran sejarah tersebut, menurut Hasan (1999: 9), terdapat tiga hal baru yang harus dilakukan dalam pendekatan pendidikan sejarah:

1. Keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa.
2. Pemahaman dan kesadaran akan karakteristik cerita sejarah yang tidak bersifat final.
3. Perluasan tema sejarah politik dengan tema-tema sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.

### ***1. Keterkaitan Pelajaran Sejarah dengan Kehidupan Sehari-hari***

Widja (1991: 95-96) dalam tulisannya *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, menyebutkan banyak keluhan tentang pembelajaran sejarah baik yang bersifat substantif maupun metodologis. Ia menjelaskan, secara substantif, materi pembelajaran di SD, SLTP maupun SMU, banyak pengulangan dan membosankan. Gutierrez (2000: 356), juga mengemukakan bahwa pembelajaran sejarah sering terlalu banyak berkisah tentang perkembangan yang jauh dari lingkungan diri siswa dan kelompoknya. Lopian (1980: 4) menyebutkan bahwa pembelajaran sejarah akhirnya kurang begitu menyentuh dengan cerita tentang diri siswa dan lingkungannya. Ia selanjutnya mengemukakan “Adalah wajar bahwa dalam banyak hal sejarah Indonesia seperti yang sedang diajarkan hingga sekarang akan kurang berceritera bagi orang-orang tertentu dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dihayati sendiri”.

Douch (1967: 7-8) dan Mahoney, (1981: 44-45) memberikan komentar yang sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa dalam mengatasi persoalan materi sejarah (nasional), perlu diadakan pembelajaran sejarah lokal yang berceritera kehidupan lingkungan sekitar siswa. Pembelajaran sejarah lokal jika dibandingkan dengan pengajaran sejarah konvensional, ia lebih mudah dihayati ataupun dimiliki karena membawa siswa ke situasi riil yang dialami di lingkungannya. Sejarah lokal dapat membawa langsung siswa mengenal peran dalam masyarakatnya. Peran lain yang dikembangkan sejarah lokal, juga memiliki peran sebagai upaya pengembangan potensi siswa kearah berpikir aktif dan kreatif.

Persoalan yang muncul hingga sekarang, walaupun pemerintah ada kepedulian terhadap apresiasi sejarah lokal dengan mengadakan pelbagai seminar dan diskusi-diskusi formal tentang sejarah lokal, akan tetapi baru sebatas langkah inventarisasi dan dokumentasi mengenai sejarah Indonesia pada tingkat lokal, dan belum melangkah ke

kerangka kajian yang lebih kritis dan sungguh-sungguh ke aspek metodologis dan struktur (Sjamsuddin, 2001: 2). Ricklefs (1983: xii) maupun Abdullah (2001: 231) menyampaikan keprihatinannya bahwa, penulisan sejarah lokal di Indonesia masih banyak menemui kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan langkanya sumber-sumber dan tenaga ahli yang memadai, serta penulisannya masih bersifat “Jawa sentris”.

## **2. Sejarah yang Tidak Pernah Final**

Pendidikan sejarah harus siap berhubungan dan setia menerapkan adagium yang dianutnya bahwa tidak ada yang kekal dalam kehidupan umat manusia terkecuali perubahan itu sendiri (Hasan, 1999: 5). Sejarah mengisyaratkan tidak ada cerita yang mapan sekalipun sudah tertera di berbagai buku sejarah, mengingat sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dianggap final dan abadi. Seixas (2000: 23) secara tegas mengemukakan “...*there is a problem with history as dogma*” Pernyataan ini sejalan dengan Carr (1985:30) menyatakan, “*history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past*”. Sejarah pada dasarnya adalah hasil rekonstruksi sejarawan. Rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan wawasan dan keterampilan proses sejarawan. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang ditentukan oleh kelengkapan fakta yang dimilikinya yang sesungguhnya tidak pernah lengkap. Cerita sejarah, karena itu selalu berpeluang terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan temuan fakta baru. Pendapat tersebut sejalan dengan tulisan Soedjatmoko (1976: 15) yang menyatakan “sebaiknya kita melihat sejarah dan penulisan sejarah (Indonesia) sebagai usaha yang belum selesai, dan menjadi tugas utama bersama antara pengajar dan yang diajar”. Jika cerita sejarah itu dimapankan hanya akan menambah beban baru bagi para pendidik sejarah.

### ***3. Perlunya Perluasan Tema Sejarah***

Ilmu sejarah secara metodologis memang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena dalam sejarah menurut Sjamsuddin (1996: 191) bersifat; kelampauan, temporal-spasial, diakronik, ideografik, partikularistik, terjadi sekali, dan tidak dapat dieksperimenkan. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial bersifat; kekinian, atemporal-aspasial, sinkronik, lebih nomotetik, generalistik, terjadi berulang/*repetition*, dapat dieksperimenkan atau diuji ulang. Gutierrez (2000: 356) maupun Sjamsuddin (1996: 197-198) selanjutnya telah mengingatkan bahwa perbedaan ini tidak berarti dalam sejarah mentabukan penggunaan konsep-konsep umum yang digunakan dalam beberapa ilmu sosial asal hal itu dianggap relevan. Pendapat tersebut berlaku selama penggunaannya untuk kepentingan analisis sehingga menambah kejelasan dalam interpretasi sejarah yang diperlukan. Perluasan secara horizontal atau melebar, tercermin dalam pengertian “Sejarah Baru” (*The New History*) yang jauh berbeda dengan “Sejarah Lama” (*The Old History*). Perbedaan itu nampak bahwa dalam sejarah baru lebih bersifat *social scientific*, berorientasi pada problem, cakupannya lebih luas dan beragam, pemaparannya bersifat analitis-kritis, dan menggunakan pendekatan interdisipliner/ multidisipliner (Sjamsuddin, 1996: 199).

Robinson, seorang sejarawan Amerika Serikat yang merupakan tokoh Sejarah Baru, menyatakan bahwa kelahiran Sejarah Baru tersebut pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap “Sejarah Lama” karena terlalu kaku membatasi diri pada kajian politik (Robinson, 1965: 1-25). Robinson selanjutnya mengemukakan bahwa dalam Sejarah Baru tersebut lebih memperluas cakrawala kajiannya baik yang menyangkut bidang kebudayaan, ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, antropologi, dan sebagainya.

## ***II. Keterkaitan Konsep; Kesadaran Sejarah – Multikulturalisme - dan Integrasi Bangsa, Sebagai Paradigma Pendidikan***

Manusia memang makhluk Tuhan yang unik dan istimewa. Ia tidak hanya mempunyai hari lampau seperti makhluk lainnya, tetapi juga mempunyai konsepsi tentang hari lampainya itu. Ia tidak sekedar mempunyai hari esok, tetapi ia berusaha memberi gambar terhadap hari esok itu. Kiekergard (Abdullah, 1999: 4; Solomon dan Higgins, 2002: 451-452) seorang filosof eksistensialis Denmark mempertautkan pentingnya hari esok dengan hari lampau. Ia menyatakan: “Hidup ini dijalani ke depan, tetapi dipahami ke belakang”. Itulah sebabnya bagi seorang guru sejarah maupun sejarawan sangat penting menyadari bahwa wujud dan isi cita-cita serta nilai-nilai suatu bangsa, tidak bisa dipahami tanpa referensi sejarah dan kesadaran pengalaman bangsa itu. Beberapa pendidik sejarah (Wineburg, 2000: 310; 2001: 12; Lowenthal, 2000: 74; Boix-Mansila, 2000:391), menyadari manusia dalam sejarah pada hakekatnya merupakan proses pengungkapan dan pandangannya tentang hari depan, terdapat kait mengait antara masa lampau dengan kini, dan inilah yang merupakan bagian kesadaran sejarah.

Soedjatmoko (1976: 9-15; 1985: 48; 1995: 368-369) mengemukakan bahwa kesadaran sejarah, merupakan suatu refleksi kontinu tentang kompleksitas perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh interaksi dialektis masyarakat yang ingin melepaskan diri dari genggamannya realitas yang ada. Kesadaran sejarah juga membantu untuk waspada terhadap pemikiran-pemikiran yang terlalu sederhana, analogi yang dangkal, serta penerimaan-penerimaan pola hukum yang terlalu mudah mengarahkan jalannya sejarah ataupun berada dalam cengkaman determinisme sejarah (Soedjatmoko, 1976: 14; Supardan, 2000: 4).

Peranan kesadaran sejarah memang luas, sekaligus sebagai refleksi kontinu yang dapat membebaskan diri manusia dari yang serba mudah percaya, menolak mitologis, serta merujuk ke suatu pencarian/pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk menentukan identifikasi diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Soedjatmoko (1976: 15) menyebutnya sebagai orientasi intelektual yang kreatif, mawas diri, dan introspeksi yang tiada henti. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi itu bukan tergantung dari kebaikan hati para penguasa, melainkan merupakan akibat dari distribusi kekuasaan dan tumbuhnya pluralisme di dalam penyusunan kekuasaan. Kita merasa yakin bahwa hanya dengan semangat dan kemampuan memadai yang menggelora tetapi terkendali dalam usaha menggali pemikiran yang kreatif dan mawas diri, kita berusaha untuk memiliki pandangan hidup yang didasarkan pada kesediaan untuk menerima kebebasan dan tanggung jawab. Reinhold Niebuhr (1949: 29) menyebutnya kesadaran sejarah tersebut sebagai dorongan emansipatoris. Sejarah, dengan demikian merupakan urusan kita semua, seluruh bangsa Indonesia, dan bukan hak atau kewajiban eksklusif dari para ahli sejarah saja.

Alasan penulis yang mendasari perlunya pembelajaran sejarah berbasis multikulturalisme dalam integrasi bangsa, terdapat berbagai alasan yang dapat penulis kemukakan di bawah ini.

Terminologi multikulturalisme menurut Stavenhagen (1986: 115) mengandung dua pengertian. Pertama, ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang majemuk. Jandt (1998: 419) berpendapat sebanyak 95 % negara di dunia pada dasarnya adalah multikultural karena secara etnis dan budaya bersifat heterogen. Ia selanjutnya memberikan contoh-contohnya bahwa, Amerika Serikat, India, RRC, Indonesia, adalah negara-negara berpenduduk banyak yang memiliki diversitas etnik dan budaya yang

heterogen serta luas wilayahnya. Keragaman etnik/budaya itu dalam kenyataannya tidak selalu diterima oleh kelompok mayoritas atau pemerintah yang berkuasa sebagai realitas sosial yang perlu dipelihara. Bias sosial inilah yang perlu diluruskan bahwa dalam pengertian yang kedua; multikulturalisme berarti keyakinan atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya (Suparlan, 2003: 31; Bennet, 1995: 115). Jadi, kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan.

Blum (2001: 16) mengemukakan, melalui pembelajaran multikulturalisme pada diri siswa itu akan muncul

... pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Blum, 2001: 16).

Multikulturalisme sebagai praktik sosial dan kebijakan pemerintah, dewasa ini telah diterima di banyak negara sebagai sesuatu yang penting. Berry dkk (1998: 576) menyebutkan multikulturalisme bahkan menjadi semacam ideologi dalam pengembangan kebudayaan serta upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Multikulturalisme pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal-balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok yang positif demi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan masyarakat (Suparlan, 2002: 99; 2003: 35). Proses untuk menapaki jalan menuju pengakuan tersebut, adalah sebuah pendakian yang terjal, dan sikap terhadap realitas multikultural masyarakat/bangsa mengalami fluktuasi perkembangan sepanjang sejarah.

Multikulturalisme, pada masa lampau dipandang sebagai suatu yang tidak berguna, dan pandangan yang anti pluralisme ini justru berkembang di negara-negara Barat. Dewey (Westbrook, 1991), bahkan menganggap multikulturalisme hanya menciptakan garis pemisah yang kuat antar kelompok dalam masyarakat; karena itu apa yang seharusnya terjadi adalah asimilasi. Dworkin (2001: 68) dan Kymlicka (2002: 50-51) berpendapat, bahwa jika ditinjau dari aspek hak-hak azasi manusia (HAM) maka multikulturalisme di samping melindungi hak-hak individu, mencakup hak-hak kolektif ataupun budaya komunitas. Jadi, tidak beralasan jika kaum liberal merasa ketakutan bahwa hak kolektif yang dituntut oleh kelompok etnis tertentu dianggap berlawanan dengan hak perorangan. Kedua jenis tuntutan dan hak azasi itu dapat dipandang sebagai upaya melindungi stabilitas komunitas bangsa. Howard (2000: 315) dan Gould (1993: 69-70) berkeyakinan bahwa dalam multikulturalisme mencakup apa yang disebut demokrasi sosial, yaitu suatu jenis liberalisme tersendiri yang menjembatani jurang antara hak-hak individu dengan komunitas.

Demokrasi sosial secara politis berkomitmen memberikan dan melindungi seluruh hak azasi manusia. Pandangan demikian ini agak berbeda dengan definisi yang sering dijadikan standar tentang demokrasi sosial sebagai “suatu etos dan cara hidup yang dicirikan oleh penghapusan perbedaan-perbedaan status secara umum” (Sartori, 1968: 113). Howard (2000: 316), lebih jauh menjelaskan bahwa dalam demokrasi sosial tidak mensyaratkan adanya penghapusan perbedaan ekonomi secara radikal. Sebab penghapusan itu menghalangi inisiatif yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi pada tingkat kolektif dan individu, bahkan bisa mengakibatkan standar kehidupan masyarakat merosot secara umum, seperti yang banyak terjadi pada masyarakat bekas komunis Eropa Timur. Demokrasi sosial dengan demikian bukan menghapuskan kapitalisme, melainkan memperbaiki kapitalisme radikal.

Trudeau seorang Perdana Menteri Kanada berdarah Prancis, merupakan tokoh politik humanis yang memiliki jangkauan jauh kedepan untuk kalangan elite politik internasional. Ia seorang pionir yang secara berturut-turut memberlakukan *Bilingualism* tahun 1974, *Constitution Act* tahun 1982, dan *Canadian Charter of Right and Freedoms* pada tahun 1982. Isi pokok kebijakan tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan fundamental, hak-hak demokrasi, hak bermukim dan bekerja, hak-hak hukum, pemakaian bahasa resmi Inggris dan Prancis, termasuk hak-hak pendidikan bahasa yang digunakan kaum *visible minorities* Kanada (Howard, 2000: 323-335, Supardan, 2002: 34).

Perkembangan selanjutnya multikulturalisme tersebut cepat meluas. Multikulturalisme sekarang telah berkembang menjadi semacam keyakinan, sikap, dan kebijakan. Multikulturalisme tidak hanya sekedar semboyan, retorika politik, atau hanya pengakuan simbolis terhadap kekayaan realitas sosial. Multikulturalisme telah menjadi pengakuan sejati terhadap identitas kelompok yang mendukung dan selaras dengan identitas nasional. Supriadi (2001:37) dan Supardan (2002:35) berpendapat bahwa terdapat empat kemungkinan kombinasi multikulturalisme. Pertama; negara dengan realitas etnik dan budaya yang heterogen serta menerima ide multikulturalisme. Kedua; negara dengan realitas etnik dan budaya yang heterogen, tetapi kebijakan pemerintahannya cenderung mengarah ke monokulturalisme. Ketiga; negara dengan realitas etnik/ras yang homogen dan memelihara kebijakan yang monokulturalistik. Keempat; negara dengan derajat homogenitas etnik/ras yang tinggi tetapi sangat menghargai multikulturalisme. Amerika Serikat, Kanada, India, Austraalia, Malaysia, adalah contoh negara kelompok pertama. RRC adalah contoh kelompok negara kedua. Israel yang mempercayai keunggulan ras Yahudi sebagai “Umat Terpilih Tuhan” dapat dimasukkan dalam kategori ketiga.

Indonesia, dengan demikian masuk ke mana ? Secara teoritis dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika termasuk kategori pertama, seperti Amerika Serikat yang bersemboyan *E Pluribus Unum (Unity in Diversity)*, tetapi dalam praktek-praktek kebijakan publik terutama sebelum reformasi, Indonesia cenderung berada pada kategori kedua (Coppel, 2003: 13; Suryadinata, 2003: 5-6). Fenomena masih adanya stereotipe, prasangka sosial, dan rasisme di Indonesia hingga kini masih menguat (Supriadi, 2001: 29). Misalnya adanya ungkapan-ungkapan “Padang Bengkok”, “Batak Rentenir dan Tukang Copet”, “Cina Licik”, “Jawa Koek”, dan sebagainya. Sedangkan untuk bukti nyata adanya rasisme dapat difahami dengan meletusnya “Tragedi Sambas” maupun “Sampit” di Kalimantan baru-baru ini terjadi.

Naisbitt (1994: 15) sebagai tokoh futuris ternama, telah memprediksi bahwa masalah suku bangsa ataupun etnis dapat menjadi bumerang bagi bangsa yang kurang arif dalam melakukan kebijakan politiknya. Kelompok minoritas ini bisa menjadi korban intimidasi dari kelompok mayoritasnya, bisa menjadi ancaman bagi perkembangan demokrasi, maupun konflik terbuka sesama etnik minoritas itu sendiri.

Toffler (1992: 10).menyatakan:

Di masyarakat industri massal, rasisme secara khas membentuk mayoritas yang menindas minoritas. Bentuk pathologi sosial ini masih merupakan ancaman terhadap demokrasi....sedang dalam proses menjadi terorisme domestik. Selain konflik tradisional antara mayoritas dan minoritas, pemerintah demokratik juga sekarang harus berusaha mengatasi perang terbuka antara berbagai kelompok minoritas yang saling bersaing.

Toffler menambahkan bahwa betapa penting golongan minoritas yang selama ini sering dianggap kecil artinya atau dipandang sebelah mata tanpa mengabaikan mayoritas. Masyarakat dalam sistem dan struktur apapun, apakah itu sistem kimiawi, negara, komputer, lalu lintas, kalau terlalu jauh aturan-aturan tradisional dilaluinya berarti itu melanggar dan bertindak dengan aneh. Kerangka acuan bagi keadilan sosial

kini dapat diibaratkan telah menjadi api dalam sekam yang siap meledak jika dibakar. Toffler (1992: 13-16) berpendapat bahwa demokrasi yang sehat karena itu harus toleran terhadap keragaman seluas mungkin, dan tidak ada sesuatu yang tidak biasa atau sangat menakutkan mengenai eksistensi kelompok-kelompok kecil seperti itu — sejauh sistem politik tetap seimbang..

Naisbitt (1994: 15) juga memberikan tanggapan serupa, ia mencemaskan beberapa fenomena yang muncul dewasa ini. “Tribalisme dimasukkan kembali dalam kosakata dunia pada tahun 1993, terutama dengan konotasi negatif yang mengerikan dan berkembang karena kebrutalan, perkosaan, pembantaian, dan bentuk-bentuk lain pembersihan etnis di bekas negara Yugoslavia”. Naisbitt menambahkan bahwa dalam globalisasi ekonomi, banyak hal yang akan menjadi universal. Konsep globalisasi juga tetap memelihara hal-hal yang bersifat “kesukuan” akan menjadi lebih penting dan lebih kuat — suatu paradoks lain yang merupakan aspek penting dalam *Global Paradox*: “Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan” yang juga berarti bagian-bagian yang lebih banyak dan lebih kecil (Naisbitt, 1994:20).

Pendapat di atas sejalan dengan pendidik sejarah Boix-Mansila (2000: 391) yang dapat dianalogikan dengan di Indonesia, bahwa jika dalam pembelajaran sejarah memiliki basis multikultural, setidaknya dapat mereduksi konflik-konflik sosial-budaya antar etnik, di samping siswa sendiri akan memiliki rasa bangga dan diakui eksistensi etnis serta budayanya. Mereka seyogyanya bukan sebagai objek dalam pembelajaran sejarah umumnya. Siswa akan memiliki rasa tanggung jawab yang kokoh, terhindar dari stereotipe dan prasangka sosial yang menghambat integrasi bangsa, sebagai respons atas pemberian penghargaan yang layak karena semua kelompok berperan mengemban misi kebangsaan. Hal itu menunjukkan pentingnya pembahasan pembelajaran sejarah berbasis multikultural, di samping faktor-faktor lain yang menunjukkan betapa menarik

pembelajaran sejarah tersebut karena sifatnya yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner.

Alasan yang mendasari perlunya pembelajaran sejarah berperspektif lokal, nasional, dan global dalam integrasi bangsa, terdapat beberapa pemikiran yang perlu penulis kemukakan.

Pertama, peranan sejarah lokal yang sebetulnya memberikan identitas dan mengisi “kevakuman” serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan rasa memiliki sebagai bangsa Indonesia, selama ini sering terabaikan. Lopian (1980: 4) menyebutnya dalam banyak hal sejarah Indonesia seperti yang sedang diajarkan hingga sekarang kurang berceritera bagi orang-orang tertentu dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dihayati sendiri. Implikasinya kelompok etnik masyarakat yang sebetulnya memiliki potensi sejarah lokal dan berkontribusi dalam kaitannya pembentukan bangsa ini merasa di luar pagar ataupun sekedar obyek pemahaman sejarah lokal lainnya. Hidayah (2001: 303) penulis Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menghargai realitas sosial yang ada bahwa terdapat 662 suku bangsa Indonesia yang tersebar dalam pulau-pulau besar dan kecil. Pembelajaran sejarah nasional Indonesia sekarang ini, lebih banyak berceritera etnik-etnik mayoritas tertentu. Sejarah lokal yang melibatkan perkembangan etnik-etnik minoritas lainnya banyak tidak tertulis dalam sejarah nasional Indonesia. Komentar Deutch (1984: 18) *Tribes have merged to form peoples; and peoples have grown into nation*, adalah suatu pernyataan yang perlu dihargai, terutama peranan suku bangsa.

Motto Bhineka Tunggal Ika sebenarnya mengakomodasi atas keragaman dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ironisnya keragaman dalam kesatuan budaya bangsa dalam perjalanan kemerdekaan

negara/bangsa lebih ditekankan pada aspek kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama penggunaan bahasa daerah mengalami kemunduran maupun kehilangan daya gunanya secara pragmatik (Wiriaatmadja, 2002: 221).

Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan primordial seperti stereotipe, etnosentrisme dan sebagainya, memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Tetapi konsep primordialisme itu sendiri memerlukan kajian yang lebih proporsional. Adanya ikatan “lokal-tradisional”, sering dirasakan sebagai suatu realitas sosial-kultural itu diperlukan sebagai pengisi identitas diri dan kelompoknya yang terasa hampa, memerlukan keakraban karena lebih bersifat naturalistik dan bukan rekayasa. Apalagi akibat proses globalisasi, kita sering terasa “sepi” dan memerlukan ikatan komunitas lama yang akrab (Abdullah, 1999: 19). Itulah sebabnya pada batas tertentu yang relevan, bisa dipahami kemunculan gerakan-gerakan *indigenous people* yang telah marak terjadi di banyak negara. Gerakan *indigenous people* ini, seperti gerakan Quebec di Kanada maupun etnis Kurdi di Timur Tengah.

Featherstone (2001: 269), mengemukakan bahwa *essentially memoryless* yang kurang terakomodasi oleh pemerintah, juga tergilas gerakan homogenisasi *pop culture* ataupun *common culture* akibat globalisasi. Terdapat beberapa kecemasan para sosiolog mencermati perkembangan sosio-budaya sekarang ini. Featherstone (2001: 270) dalam bukunya *Consumer Culture and Postmodernism*, mengatakan fenomena kehidupan yang berkembang sekarang ini sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanannya pada hedonisme, pengejaran kesenangan di sini dan saat ini (*here and now*) penanaman gaya hidup ekspresif, pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik. Gerakan mengenai kapitalisme multinasional, Amerikanisasi,

imperialisme media serta budaya konsumen, seolah-olah telah mengasumsikan bahwa perbedaan lokal-tradisional terhapus oleh beberapa kekuatan universal tersebut.

Sejarah lokal yang merupakan kisah masa lampau dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis” terbatas baik dalam komunitas “*township*” atau “*village*”, “*desa*”, maupun “*county*”, memiliki dua peran. Pertama, ada peristiwa yang tetap akan mempunyai arti lokal saja, dan kedua; ada pula yang mengandung makna yang lebih luas. Penulis sependapat dengan Lopian, (1980: 7) yang mengatakan bahwa sejarah lokal patut dipelajari dan diteliti untuk bisa mengadakan koreksi terhadap generalisasi-generalisasi yang sering dibuat dalam penulisan sejarah nasional. Pentingnya sejarah lokal ini juga dikemukakan Douch (1967: 7-8) dan Mahoney (1981: 44-45), bahwa apabila dibandingkan dengan pengajaran sejarah yang konvensional, keunggulan pengajaran sejarah lokal adalah “kemampuannya” membawa siswa kepada situasi riil dalam lingkungannya. Pengajaran sejarah lokal dapat menerobos dan menjembatani antara apa yang terjadi dengan dirinya maupun lingkungan kehidupannya.

Kedua, peranan pembelajaran sejarah nasional; yang mampu mendorong pemahaman kondisi nasionalisme dan integrasi bangsa Indonesia itu terjadi. Kita sadari sejak adanya “penemuan identitas bangsa” ini pada tanggal 28 Oktober 1928, secara simbolik identitas tersebut telah mendapat pengesahan dalam Sumpah Pemuda sebagai sebuah komunitas baru. Anderson (1983: 15) mengemukakan, inilah komunitas yang dibayangkan atau *an imagined political community*, karena setiap anggota komunitas tersebut sesungguhnya tidak mengenal satu sama lainnya, bahkan dari sebuah nation yang paling kecil sekalipun. Mereka mengenal hanya dalam pikiran saja mereka hidup dalam kebersamaan. Anderson (1983: 109) lebih jauh menyatakan; *Indonesians annually celebrate the Sumpah Pemuda (Oath of Youth) drawn up and sworn by the*

*nationalist youth congress of 1928*. Ikrar tersebut bukanlah suatu hasil renungan kontemplatif belaka, tetapi didahului oleh pencarian, perdebatan, serta konflik yang menegangkan. Abdullah (1984: 416) berpendapat, peristiwa itu didukung oleh pengorbanan yang luar biasa — kisah sepuluh tahun dari organisasi-organisasi pemuda, dileburkan pada halaman baru dalam sejarah.

Sumpah Pemuda yang merupakan embrio *nation state*, ternyata dalam perjalanan nilai-nilai yang dikembangkan, telah membuahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Prestasi dan ciri unggul itulah yang menjamin keberhasilan atau kemenangan perjuangan nasional kita. Semangat kebangsaan tersebut telah diperkuat oleh mobilisasi generasi muda pada jaman Jepang yang menimbulkan jiwa (*spirit*) revolusi yang menentang segala usaha kaum kolonialis untuk bercokol lagi di Indonesia. Perjuangan itu telah menunjukkan adanya pengalaman bersama bangsa Indonesia di masa lampau sehingga wajar apabila cerita proses integrasi bangsa itu dapat dicakup dalam apa yang disebut Sejarah Nasional Indonesia. Kartodirdjo (1999: 29) menguraikan pentingnya pembelajaran Sejarah Nasional, bahwa:

Adapun fungsinya terutama menerangkan eksistensi ataupun sosio-genesis negara-nasion kita. Ini berarti bahwa identitas nasional kita terikat pada Sejarah Nasional itu, maka dapat pula Sejarah Nasional itu dipandang sebagai lambang identitas bangsa Indonesia. Dipandang kepentingannya dalam pembangunan bangsa, Sejarah Nasional berperan sangat strategis dan fundamental, terutama dalam membangun kesadaran nasional khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dalam Sejarah Nasional tersebut berperan sebagai sumber inspirasi dan aspirasi pada generasi muda yang mencakup heroisme, yaitu cerita-cerita kepahlawanan tanpa memperluas kultus individu.

Perkembangan politik yang makin memantapkan eksistensi negara nasional telah mendorong secara pesat terwujudnya sejarah nasional yang mengisahkan kehidupan negara nasional itu. Dokumen-dokumen mulai tersusun dan tersimpan dalam arsip-arsip negara yang dapat mendorong sejarawan mengikuti batasan sebagai

unit politik (Kartodirdjo, 1992: 55). Unit politik ini juga berperan sebagai sistem yang berfungsi mencakup segala aspek kehidupan kesatuan nasional (ekonomi, politik, sosial-budaya, dan sebagainya). Unit sejarah tersebut merupakan unit geopolitik, yang mewujudkan unit proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya. Melalui proses seleksi secara relevan yang bertolak dari prinsip-prinsip kepentingan nasional yang didukung fakta historis kuat, terbentuklah sejarah nasional Indonesia.

Pembelajaran sejarah nasional sebagai unsur pengembangan nasionalisme kultural sangat berfungsi untuk menjadi mediasi dalam memantapkan hubungan antara unsur-unsur masyarakat pluralitas. Vanderburg (1985: 272) menambahkan bahwa selain itu melalui pembelajaran sejarah nasional, juga berupaya membentuk model-model perilaku yang memupuk nasionalisme kultural untuk menciptakan pola hubungan yang mengatasi lingkungan temporal dan spasial serta dimensi-dimensi lainnya (Vandenburg, 1985: 272).

Bachtiar berpendapat bahwa sebenarnya cita-cita kita bersama sebagai bangsa Indonesia adalah sederhana tetapi mulia; yaitu untuk membentuk suatu masyarakat di mana semua golongan / etnis dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain, bahkan dapat membantu/mendukung golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur (Bachtiar, 2002: 45). Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan tercapainya cita-cita yang demikian itu tidaklah mudah. Ia memerlukan banyak pengorbanan, waktu, energi, dan kesabaran. Mengingat untuk mencapai masyarakat yang memiliki persatuan yang kokoh, serta adil dan makmur, bukan semata-mata merupakan tugas sekelompok orang tertentu saja, melainkan seluruh bangsa Indonesia.

Svalastoga (1989: 92), Professor Sosiologi Universitas Kopenhagen Denmark dalam bukunya *Social Differentiation*, menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat

heterogen untuk mencapai suatu negara yang memiliki derajat integrasi bangsa yang kokoh, terlebih dahulu harus dipenuhi syarat adanya interaksi antar etnis yang intensif dan bermakna. Ia menambahkan bahwa pola interaksi positif yang menunjang integrasi bangsa tersebut harus didukung oleh pola interaksi menyenangkan dan dilandasi rasa saling percaya dan saling menguntungkan. Pengertian menguntungkan di sini bukan sekedar keuntungan secara materiil akan tetapi juga termasuk pengakuan dan penghargaan atas kesetaraan hak dan kewajiban sebagai bangsa (Svalastoga, 1989: 93). Knapp seorang Sosiolog dalam karyanya *Social Intercourse: From Greeting to Goodbye*, ia lebih rinci lagi menjelaskan tahapan-tahapan interaksi itu mencakup tahap *initiating, experimenting, intensifying, integrating*, sampai ke tahap *bonding* (Knapp, 1978: 17-28), sebagai prasyarat sebelum faktor lainnya. Menurutnya, baru setelah syarat pertama itu dipenuhi, perlu adanya pemenuhan syarat-syarat lainnya sangat tergantung pada perkembangan organisasi otonom yang dapat menjembatani antara kelompok primer dan pemerintah.

Organisasi otonom yang dapat berfungsi sebagai penengah tersebut, merupakan organisasi berdasarkan ikatan profesi maupun organisasi sosial politik yang memiliki kesadaran berbangsa/bernegara yang tinggi. Poespowardojo (1999: 74-75) dalam kaitannya dengan perlunya kesadaran bangsa, mengemukakan bahwa semangat kebangsaan perlu diterjemahkan ke dalam empat nilai eksistensial, dengan rumusan sebagai berikut: Pertama; integrasi bangsa menuntut perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warganegara. Pernyataan tersebut diartikan tidak ada diskriminasi ras yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kekuatan-kekuatan yang bisa menekan dan memperkecil hak serta kewajiban kelompok minoritas. Kedua; integrasi bangsa menuntut jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara serta berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Kejujuran dan kewajaran, menjadi kunci dalam

merealisasikan keadilan dalam bentuk komunikatif maupun distributif. Ketiga; integrasi bangsa menuntut dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, harus menjadi komitmen setiap warga masyarakat. Keempat; integrasi bangsa menuntut sikap keterbukaan. Keterbukaan (tranparansi) dan keadilan pemerintah akan meningkatkan legitimasinya, sejauh memiliki komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, tentang perlunya pembelajaran sejarah global. Semua orang menyadari bahwa sekarang ini proses dan pengaruh globalisasi makin dirasakan sebagai bagian dari kehidupan kita. Giddens (1990: 64) secara ringkas menyebutnya bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial sejagat yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa lokal bisa terjadi disebabkan oleh kejadian ditempat lain yang sekian mil jauhnya dan sebaliknya. Ohmae, Direktur Pengelola dari *Mc-Kinsey & Company* dan Direktur Manajer Lembaga Penelitian Heisei Jepang yang sering dijuluki sebagai “Mr Strategy”, mengemukakan bahwa secara politis batas-batas antar negara semakin sirna (Ohmae, 1993:183-185; 2002: 171-175). Karena itulah menurut Mazlish dan Bultjes (1993: 2) dalam tulisannya yang berjudul *An Introduction to Global History*, menyatakan bahwa sejarah global sebagai bentuk penggambaran kolektif terhadap masalah-masalah dunia/global yang aktual untuk membantu pemahaman dimensi proses globalisasi yang “*multi-faceted*”. Mazlish dan Bultjes (1993: 3) lebih jauh menjelaskan bahwa *starting point for global history* adalah menguatnya fenomena globalisasi itu sendiri yang berdimensi luas membawa harapan dan kecemasan.

Globalisasi yang makin kuat resonansinya khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam proses memelihara dan meningkatkan integrasi

bangsa, perlu mendapat perhatian tersendiri. Keunikan globalisasi, karena bukan sekedar menyangkut bahwa proses ini sedang terjadi, melainkan juga bagaimana persiapan kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Dua sejarawan ternama, dalam kaitannya dengan persiapan menghadapi globalisasi ini memberikan komentarnya yang serupa.

Pertama adalah Laue yang menulis buku *What History for the Year 2000 ?*. Tulisan Laue (1981: 23) yang penuh semangat dan optimisme dalam memasuki abad ke-21, mengajukan bentuk pembelajaran sejarah masa depan yang berintikan: (1) sejarah global yang merupakan unit sejarah yang relevan untuk mewujudkan *a new civic history* yang mendukung bagi *the age of global confluence*, (2) sejarah yang mengarah pada *refinement of the internal structures of human will*, yaitu sejarah yang menyajikan hubungan setara sesama umat manusia berdasarkan saling menyayangi, mengasihi, dan memperkokoh kesetiakawanan sesama manusia, (3) sejarah yang memiliki perpektif ke depan dengan memahami masa lampaunya.

Tokoh yang kedua adalah Kennedy dalam karyanya *Preparing for the Twenty-First Century*, deskripsinya telah mengingatkan kita yang cukup mencemaskan, bahwa akan ada sekelompok negara-negara yang muncul sebagai pemenang (*winner*) dan sekelompok lain tertinggal sebagai yang kalah (*loser*), ketika proses perubahan yang fundamental dan revolusioner itu terjadi (Kennedy, 1995 290-292). Adanya pengelompokan *winner* dan *losers* tersebut disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi dan respons tiap negara dan bangsa terhadap perubahan (globalisasi) yang revolusioner tersebut. Terdapat beberapa negara yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan (*fast adjusters*) yang sekaligus mengadakan reformasi yang berani. Sedangkan yang lain muncul sebagai *slow adjusters* karena ketidak-siapan itu dalam menghadapi perubahan tersebut. Di dunia ini tidak adak satu bangsapun yang ingin

menjadi kelompok negara dan bangsa sebagai *the loser*. Akan tetapi yang menjadi pokok persoalan bukan soal ingin dan tidaknya, melainkan soal siap dan tidaknya. Pertimbangan inilah bahwa perlu pendidikan sejarah berperspektif global dalam kaitan dengan makin terasanya globalisasi.

Penjelasan sejarah global dan globalisasi yang sederhana tersebut, proses globalisasi ternyata menekankan kepada dua hal. Pertama, adanya upaya yang makin kuat mendorong globalisasi untuk mempercepat prosesnya yang sedang terjadi. Kedua, adanya kenyataan peningkatan kesadaran kolektif mengenai kehidupan masyarakat global yang meliputi segenap bangsa dan seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Pengertian pertama mengacu kepada adanya fenomena percepatan globalisasi dewasa ini, sedangkan dalam pengertian kedua mengacu kepada tuntutan pengembangan perspektif global melalui pendidikan sejarah global, agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, serta keterampilan kesiapan dalam partisipasinya di berbagai bidang kehidupan. Mereka diharapkan dapat menempatkan diri dan memaknainya dalam berkontribusi terhadap masa kini dan mendatang (Diaz, 1999: 37-38). Penyikapian untuk globalisasi tersebut, suatu hal yang mustahil dan hanya akan menimbulkan masalah baru jika kita dalam menyikapinya melalui cara-cara yang konfrontatif apalagi tanpa disertai persiapan-persiapan nyata melalui peningkatan sumber daya manusianya.

Pemahaman secara seksama jika kita cermati dalam perkembangan sejarah, maka nampak jelas bahwa proses globalisasi berhubungan dengan makin menguatnya kembali faham /ideologi liberalisme. Fakhri (2001: 218-219). menyebutnya faham ini sebagai neoliberalisme. Faham inilah yang disosialisasikan secara intensif oleh negara-negara industri maju-liberal, diterapkan melalui penekanan kebijakan pasar bebas, investasi modal asing, privatisasi, dan semangat '*laissez faire laissez passer*'. Wallerstein (1996: 539-540), seorang Sosiolog dan Direktur Fernand Braudel Pusat

Studi Ekonomi dan Sistem-sistem Sejarah State University of New York di Binghamton terkemuka, menyatakan bahwa dalam ekonomi dunia kapitalis membentuk “satu sistem sejarah” seperti itu. Wallerstein (1996: 540), selanjutnya menyatakan:

Ekonomi dunia kapitalis membentuk satu sistem sejarah seperti itu. Menurut saya ekonomi dunia kapitalis mulanya ada di Eropa pada abad ke 16. Ia adalah sebuah sistem yang didasarkan pada keinginan untuk mengumpulkan modal, persyaratan politis mengenai tingkat harga, (modal, komoditi dan tenaga), dan polarisasi yang terus menerus mengenai kelas dan daerah (pusat/pinggir) sepanjang waktu. Sistem ini telah berkembang dan meluas ke seluruh bumi ini pada abad selanjutnya. Dewasa ini telah mencapai suatu titik, di mana sebagai akibat dari perkembangannya yang komprehensif itu, ia mengalami krisis terus menerus.

Mickletwait dan Wooldridge (2000: 29), dalam *Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, melihat globalisasi dari sisi yang berbeda. Mereka berpendapat sebagai motor yang menggerakkan globalisasi sehingga proses globalisasi itu sendiri begitu cepat menembus batas antar bangsa/negara, terdapat *three engines globalization* yang menggerakkan globalisasi, yaitu:

*... technology, the capital market, and management... Each of these forces is powerful enough in its own right, but what has given them their apparent invincibility in recent years is the fact that they all fit together so neatly. Free-flowing capital makes it easier for companies in even the most out-of-the-way places to buy new technology. New technology makes it easier to move capital to similarly obscure places. And management — by which we mean the spread of common management methods, the growth of the management industry of consultants and business schools, and the development of new cadre of professional multinational managers — alerts companies to the clever ways in which they can use capital and technology.*

Ritzer dan Goodman (2004: 588) dalam karyanya yang berjudul *Modern Sociology Theory*, globalisasi yang begitu luas cakupannya, menurutnya dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik ataupun institusional. Masing-masing bidang kajian, kunci perbedaannya adalah; apakah seseorang melihat meningkatnya homogenitas atau heterogenitas? Pada titik ekstrim, globalisasi secara *kultur* dapat dilihat sebagai ekspansi transisional dari praktik bersama (homogenitas), ataupun

sebagai proses di mana banyak input kultural lokal dengan global berinteraksi mengarah ke pencangkakan kultur (heterogenitas), maupun ke arah imperialisme kultural (Ritzer dan Goodman, 2004: 588).

Ritzer dan Goodman (2004: 589), maupun Stiglitz (2002: 34) berpendapat bahwa kajian yang menekankan faktor ekonomi, cenderung menekankan arti penting ekonomi dan efeknya yang bersifat *homogenizing* ke arah ekonomi pasar ke seluruh dunia, tanpa melihat perbedaan nasional dengan pendekatan “*one-size-fits-all*” yang menyisakan sejumlah keresahan dan kesenjangan. Hardt dan Negri (2000: 133) dalam karyanya *Empire* menyampaikan pandangan yang berbeda karena menekankan pada aspek *politik/institusional*, bahwa terdapat penyebaran model *nation-state* di seluruh dunia yang lebih serupa. Kajian budaya, ekonomi, maupun politik, baik secara populer dan akademik, masalah globalisasi menjadi semakin menarik untuk dikaji. Keanekaragaman pemahaman globalisasi ini mendorong berkembang berbagai teori globalisasi yang muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, seperti halnya terhadap modernisasi.

Berbagai teori globalisasi yang berkembang hingga kini adalah; teori *Techno-Capitalism* dari Kellner (2002: 287) dalam karya terakhirnya *Theorizing Globalization* yang menekankan hubungan dialektis antara tekno-sains dengan ekonomi kapitalis atau tekno-kapitalisme. Teori *Runaway World* dari Giddens (2000: 23) dalam bukunya *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives* yang pembahasannya memfokuskan pada kaitan erat globalisasi dan risiko, khususnya dengan munculnya *manufactured risk*. Giddens (2000: 37) selanjutnya menyatakan bahwa “Kita tak akan pernah mampu menjadi penguasa sejarah kita sendiri, tetapi kita dapat dan harus mencari cara untuk membuat dunia yang tak terkendali ini menjadi terkendali”.

Teori *Perang-Ruang* dari Bauman (1998: 9) dalam bukunya *Globalization: The Human Consequences*, melihat bahwa globalisasi diwarnai oleh faktor kemampuan “mobilitas” yang menjadi faktor terbentuknya stratifikasi yang paling dominan. Ia beranggapan, hanya mereka yang “mobile” yang mampu menguasai dunia dalam proses memaknai dirinya sendiri. Sebaliknya kaum ‘pecundang’ tidak hanya berada dalam kekurang-mampuan mobilitas, tetapi terkurung dan tidak mampu memberi makna kehidupannya sendiri. Bauman (1998: 97) berasumsi bahwa pemenang adalah “hidup dalam waktu” karena baginya ruang bukan masalah. Tidak berarti semua orang mampu untuk mobile, bahkan sebagian besar orang hidup di antara dua titik ekstrim, mereka merasa tidak pasti, sebagian mereka tidak bisa melihat cahaya *esok hari*.

Teori *Globalization of Nothing* dari Ritzer (2004) yang disajikan dalam buku *Globalization of Nothing: Why So Many Make So Much Out of So Little*. Suatu metateori yang menganalogikan “nothing” sebagai bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara sentral yang sebagian “kosong” dari isi yang distingtif dan mengglobal. Terdapat empat sub tipe *nothing*; (1) *non-places*, seperti pusat perbelanjaan mall, (2) *non-things* seperti kartu kredit, (3) *non-people*, seperti karyawan yang diasosiasikan telemarker, (4) *non-servis* seperti ATM.

Teori *Landscape* Appadurai, yang menurut Ritzer dan Goodman (2004: 597) merupakan teori globalisasi paling populer dan banyak dikutip oleh banyak para ahli. Teori ini dimuat dalam buku *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Appadurai mengemukakan bahwa terdapat arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut yang mencakup; pertama, *ethnoscapes* (kelompok turis dan pekerja tamu), kedua *technoscapes* (teknologi tinggi mekanistik dan informasional yang mengglobal), ketiga *financescapes* (pasar bursa saham dan pasar modal), keempat

*mediascapes* (koran, majalah, televisi, internet), dan kelima *ideoscapes* atau serangkaian imaji yang bersifat politis pro dan kontra (Appadurai, 1996: 33-36).

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang secara objektif kondisi sosio-budayanya sangat heterogen, jelas memerlukan jalinan kuat guna memelihara dan meningkatkan kesadarannya. Pertimbangan heterogenitas itulah sebabnya, kajian integrasi bangsa menjadi penting untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan bernegara. Sebab, negara sebagai konsep lembaga organisasi pemerintahan yang berdaulat dalam batas kewilayahan tertentu, berkewajiban memelihara dan mengembangkan proses integrasi bangsa. Smend (dalam Barthsperger, 1984: 74) yang menampilkan pandangan barunya yang lebih dinamis, bahwa negara adalah suatu proses integrasi yang berkelanjutan untuk dituangkan ke dalam praksis penyelenggaraan, seperti institusi-institusi, prosedur dan tata-tertib, serta simbol-simbol yang membawa makna tertentu.

Poespowardojo (1999: 74) yang mencoba berupaya menguraikan perwujudan nilai-nilai integrasi bangsa tersebut, menurutnya perlu ditempuh dua cara. Pertama, mengeksplisitkan secara kontekstual nilai-nilai mana yang terkandung dan dituntut oleh semangat kebangsaan. Kedua, menumbuhkan pola interaksi di segala bidang yang memberikan semangat kebangsaan dengan pedoman pada nilai-nilai di atas. Poespowardojo (1999: 75) selanjutnya mengemukakan bahwa semangat kebangsaan ini perlu diterjemahkan dalam empat nilai interaksi sosial, sebagai berikut: (1) Tumbuhnya pola interaksi yang menghormati persamaan hak warga negara dengan menghapus diskriminasi. (2) Pengembangan pola interaksi yang berdasarkan keadilan dengan menghapus praktek-praktek KKN. (3) Pembangunan kembali pola interaksi yang bersendikan partisipasi masyarakat dengan meninggalkan praktek kekuasaan yang

otoriter-represif. (4) Pembentukan pola interaksi yang berorientasikan keterbukaan serta menghindarkan diri dari primordial, segregasi sosial, dan eksklusifisme.

Fisher dan Ury (1991), memberikan komentar yang berbeda. Kebutuhan pokok manusia pada hakekatnya terdiri dari empat hal: pertama keamanan, kedua kecukupan ekonomi, *ketiga* rasa kebersamaan (*sense of solidarity*), dan keempat pengakuan (*recognition*). Memahami kebutuhan pokok manusia tersebut jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang ini maka yang diperlukan mendesak adalah; usaha konkrit yang menunjang rasa solidaritas dan ikut memiliki Indonesia yang bermasyarakat plural, yang harus dikembangkan dalam wujud kegiatan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya. Simbol-simbol pengakuan atas kehadiran kebhinekaan bangsa perlu dikembangkan. Kebhinekaan adalah kekuatan ketunggalan bangsa. Kelompok minoritas khususnya harus merasakan kehadiran suasana akrab (*intimacy*) di tengah-tengah masyarakat kelompok mayoritas yang dapat rasa 'kerasan' hidup bersama dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Svalastoga (1989: 92-93), Sosiolog Denmark maupun Knapp (1985: 152-158), serta Duverger (1985: 354), seorang ahli sosiologi-politik Prancis, tiga-tiganya mengakui pentingnya interaksi antar etnis maupun rasa solidaritas sebagai syarat mutlak yang harus ada dalam integrasi bangsa.

Fisher dan Ury dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengembangan integrasi bangsa Indonesia, mereka berpendapat bahwa bahwa rasa memiliki (*sense of belonging*) yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan (*sense of solidarity*) merupakan kebutuhan bagi setiap individu maupun kelompok. Itulah sebabnya Wiriaatmadja (2002: 228) mensyaratkan bahwa rasa memiliki dapat meningkat ka arah solidaritas bangsa merupakan elemen dasar terwujudnya integrasi bangsa. Mengingat pentingnya rasa memiliki, maka harus terus dipupuk dan disosialisasikan.

Bangsa Indonesia yang memiliki kemajemukan etnis, agama, dan budaya, dengan segala macam aspek kehidupan yang menyertainya, merupakan aset nasional yang amat kaya tetapi juga sekaligus mengandung kerawanan-kerawanan tertentu. Sjamsuddin (1993: 56) dan Simatupang (2002: 202) menyebutnya kerawanan tersebut sebagai faktor-faktor tenaga sentrifugal yang potensial jika terdapat kesenjangan-kesenjangan dalam berbangsa dan bernegara. Suparlan dan Thohari, antropolog Universitas Indonesia dan Gajah Mada menyebutnya bahwa pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik ke-Indonesiaan yang sangat indah dan mempesona, tetapi sekaligus rawan konflik (Suparlan, 2003b: 33-34; Thohari, 2000; 132).

Persoalan-persoalan yang kompleks dan menarik inilah yang mendorong penulis memilih topik tersebut, di samping faktor-faktor lainnya yang mencerminkan betapa menarik dan mendesaknya pembahasan topik tersebut untuk diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah bagi penulis khususnya.

### ***III. Penelitian-penelitian Terdahulu***

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang pembelajaran sejarah yang berbasis multikulturalisme dan perpektif sejarah (lokal, nasional, dan global) dalam kaitannya dengan integrasi bangsa Indonesia, belum begitu banyak diteliti, tetapi ada pula beberapa wacana dan jajak pendapat yang terbatas jumlahnya itu antara lain:

1. Tim Litbang Kompas, menyajikan hasil jajak pendapat pada tanggal 6-8 Agustus 1998 dengan topik Indonesia dalam Krisis Kebangsaan, melaporkan bahwa sebanyak 60 % responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, 24,3 % merasa bangga, 3,1 % tidak tahu, dan 12,6 % biasa saja.

2. Sujatmiko(1999: 3)., sosiolog Universitas Indonesia, dalam penelitiannya yang berjudul Integrasi dan Disintegrasi Nasional, melaporkan bahwa Indonesia akan memasuki masa kritis (tahap 51-100 tahun) karena semakin hilangnya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan-kesepakatan (Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan). Sujatmiko berpendapat, generasi pasca 1945 (utamanya kaum intelektual/mahasiswa dan para pemuda golongan menengah lainnya) akan berbeda dengan sebelumnya karena lebih bersifat rasional, asertif dan mereka tidak menerima “Integrasi Buta” atau “Integrasi Tanpa Reserve”.
3. Triardianto dan Suwardiman (2002: 321) yang secara rinci mengidentifikasi berbagai konflik disintegratif di Indonesia menyebutkan bahwa fenomena semakin banyaknya konflik telah membentuk suatu kurva yang menghubungkan variabel-variabel itu dengan bentuk khusus. Kurva itu kemudian disebut sebagai ‘atraktor aneh’ yang menjadi biang keladi kekacauan. “Atraktor aneh” ini bisa berupa “masalah-masalah yang dianggap kecil”, seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, maupun Ambon yang penyulutnya peristiwa pencurian maupun perkelahian pribadi. supir angkot dalam tragedi Ambon. Selain itu atraktor aneh tersebut juga berupa keterlibatan para aparat keamanan dalam konflik tersebut.
4. Simbolon (2000: 2-6) mengemukakan bahwa krisis multidimensi Indonesia, telah membuka seluruh “topeng” sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi. Ia dengan putus asa dan emosional penuh sinis serta sindiran terhadap Indonesia sebagai negeri yang serba seolah-olah, *a heap of delusions*, tidak ada lagi sebenarnya apa yang disebut nasionalisme, heroisme, keadilan, persatuan, kejujuran maupun kebanggaan.

Pendeknya, lembaga-lembaga lama bertahan kendati tanpa wibawa. Indonesia membangun dengan fundamental ekonomi yang seolah-olah kuat, dengan politik yang seolah-olah stabil; dengan kesadaran seolah-olah bersatu; dengan pemerintah yang seolah-olah bersih dan kompeten; dengan ABRI yang seolah-olah satria; dengan ahli hukum seolah-olah adil; dengan

peengusaha yang seolah-olah *captains of industri*;... Semua tampak salah, ibarat gigi palsu yang memang lebih kemilau daripada gigi asli,...mirip kebohongan di atas kebohongan.

Pendapat Simbolon tersebut seperti dikemukakan sebelumnya bersifat emosional, oleh karena itu tidak sepenuhnya benar, tetapi gambaran itu juga tidak sepenuhnya salah, bahwa integrasi bangsa khususnya sedang mengalami krisis yang berbahaya.

5. Siswomihardjo (1998: 14) dalam hasil telaahannya yang dipaparkan pada Seminar Nasional, mengemukakan bahwa dewasa ini tampak bahwa dunia dan negara-negara bangsa menghadapi permasalahan semakin kompleks. Modernisasi yang membawa implikasi transformasi yang sangat cepat dan mendasar, menjadi sumber utama permasalahan ini. Ia dengan mengamati kondisi aktual yang makin kompleks, fragmentaris, dan disintegratif itu ia menyimpulkan bahwa “kesemuanya menjadi tidak pasti, dan yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri”. Nasionalisme Indonesia-pun menjadi “mandeg” ,kehilangan aktualitas, terbelenggu oleh kebekuan dogmatis dan penyempitan ideologis. Ironisnya dalam menyiasati kemungkinan seperti ini justru dianjurkan untuk tetap memperjuangkan nasionalisme dan integrasi bangsa Indonesia. Penulis menginterpretasikan bahwa semestinya terlebih dahulu diadakan semacam redefinisi maupun revitalisasi konsep-konsep nasionalisme itu sendiri termasuk integrasi bangsa yang lebih aktual sesuai dengan tantangan zaman.
6. Tim Litbang Kompas 28 Oktober 2002 menyajikan hasil jajak pendapat tentang Ikatan Kebangsaan Mulai Renggang melaporkan bahwa justru di saat bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai gempuran persoalan, ikatan kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat saat ini dinilai semakin melemah. Masyarakat luas sampai sejauh ini tidak terlihat upaya produktif yang membuat bangsa ini menjadi solid. Data ini bisa ditunjukkan dengan sebanyak 71 % responden yang dihubungi

menganggap ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat sekarang ini *melemah*. Tidak lebih dari 20 % responden lainnya menganggap masih kuat, 9 % tidak tahu / tidak menjawab. Kemudian dalam hal “keutuhan negara” sebagai satu kesatuan. Sebanyak 55 % khawatir bahwa keutuhan wilayah negara Indonesia akan buyar, terutama setelah lepas dan merdekanya Timor Timur. Aspek Kerukunan Antar Pemeluk-Agama, ternyata sebanyak 41 % responden mengatakan situasi kerukunan antar pemeluk agama saat ini bertambah buruk, apalagi Indonesia saat ini mulai diusik dengan tuduhan internasional sebagai sarang terorisme.. Hanya 29 % responden yang masih bersikap optimis, terutama adanya gerakan-gerakan lintas agama yang mengedepankan kepentingan bersama. Kemudian dalam aspek integrasi bangsa bahwa kaum muda menunjukkan ketidak-berperannya sebanyak 54 %.

7. Jajak pendapat Tim Litbang Kompas (29/10/2002) tentang “Generasi Muda Patutkah Kita Banggakan ?” Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 69 % responden menyatakan pengakuannya terhadap kekritisannya para pemuda dalam mencermati kebijakan pemerintah dan lembaga tertinggi serta lembaga tinggi lainnya. Sisanya responden menyatakan mereka tidak kritis. Di bidang politik para responden sebagian besar (67 %) menyatakan peran pemuda masih kurang memuaskan, alasannya masih banyak pemuda yang terjebak yang tidak produktif bahkan kadang-kadang mereka meresahkan masyarakat. Kemudian dalam persoalan sosial, sebanyak 61 % responden menyatakan pemuda identik dengan *persoalan sosial*, seperti; terlibat berbagai kasus narkoba dan tawuran, sisanya masih memiliki kiprah positif. Sebanyak 55 % para menyatakan bahwa pemuda lebih terlibat *seks bebas* serta menyukai VCD porno, dan sebanyak 60 % citra kawula muda identik dengan gaya hidup yang konsumtif.

8. Adam (2001: 3), sejarawan dan peneliti LIPI, yang melaporkan telaaahannya dalam tulisan yang berjudul “Ancaman Disintegrasi Bangsa di Depan Mata”, menjelaskan bahwa:

Di berbagai daerah untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, terdapat gelombang pengungsi yang bukan akibat bencana alam. Di Pontianak dan sekitarnya terdapat ribuan keluarga Madura yang tinggal di “kamp-kamp pengusian” tanpa kejelasan dan nasib dan masa depannya. Di NTT menjadi tempat penampungan lebih dari seratus ribu warga eks Timor Timur... Di Medan terdapat ribuan pengungsi Aceh. Menurut sebuah catatan, kini telah terdapat lebih dari sejuta pengungsi di seluruh Indonesia. Mereka adalah warga negara yang terlempar dari rumahnya akibat “perang saudara” dan menjadi suatu komunitas orang asing di negeri sendiri... belum lagi kasus-kasus Aceh, Poso, dan Irian Jaya, dan Ambon.

Adanya ketersingkirkan sosial akibat berbagai kerusuhan dan kekerasan yang terjadi, maka dapat diindikasikan bahwa makin menipisnya rasa aman serta kebanggaan sebagai bangsa. Nasionalisme dan integrasi bangsa yang telah kita capai, kini layak dipertanyakan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebenarnya.

Hasil-hasil kajian di atas merupakan bukti empirik yang memperkuat keyakinan penulis bahwa kesadaran sejarah khususnya di kalangan pemuda sekarang ini menunjukkan titik lemah yang memprihatinkan. Implikasi rendahnya kesadaran sejarah tersebut pada gilirannya menimbulkan rendahnya kesadaran nasionalisme dan integrasi bangsa. Fakta inilah yang mendorong penulis memilih topik “Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global untuk Integrasi Bangsa: Studi Kuasi Eksperimental terhadap Siswa Sekolah Menengah Umum di Kota Bandung”.

## **B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .**

Penulis setelah memahami uraian latar belakang di atas, melihat bahwa persoalan utama dalam proses integrasi bangsa adalah begitu rendahnya kesadaran

sejarah yang dibangun atas dasar multikulturalisme dan perspektif sejarah (lokal, nasional, global) dalam memperkokoh integrasi bangsa.

Rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: *Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol dengan diberikannya perlakuan pembelajaran sejarah yang berbasis multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, global, dalam integrasi bangsa ?*

Rumusan masalah yang bersifat makro tersebut, kemudian penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pembelajaran multikultural (X1) terhadap interaksi antar etnis (Y1) ?
2. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah lokal (X2) terhadap interaksi antar etnis (Y1) ?
3. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah nasional (X3) terhadap interaksi antar etnis (Y1) ?
4. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah global (X4) terhadap interaksi antar etnis (Y1) ?
5. Seberapa besar pengaruh pembelajaran multicultural (X1) terhadap rasa solidaritas bangsa (Y2)?
6. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah lokal (X2) terhadap rasa solidaritas bangsa (Y2)?
7. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah nasional (X3) terhadap rasa solidaritas bangsa (Y2) ?
8. Seberapa besar pengaruh pembelajaran sejarah global (X4) terhadap rasa solidaritas bangsa (Y2) ?

9. Seberapa besar pengaruh interaksi antar etnis (Y1) terhadap rasa solidaritas bangsa (Y2) ?

Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut dapat penulis jelaskan tentang variabel bebas dan variabel terikatnya. Sebelum penulis menentukan mana variabel bebas dan terikatnya, ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu tentang konsep dasar variabel.

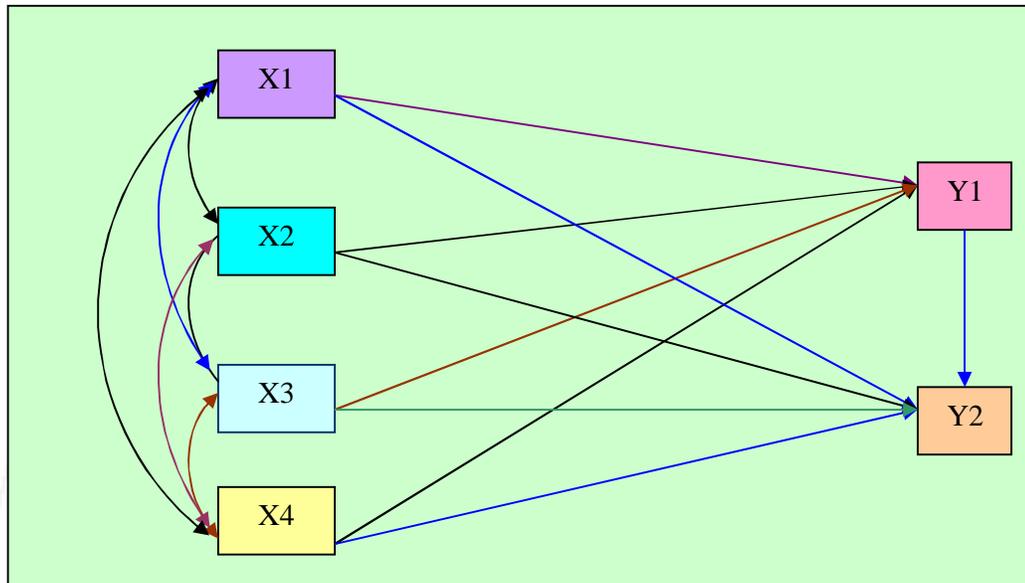
Best (1978: 92) menyatakan bahwa "*variables are conditions or characteristic that the experimenter manipulates, controls, or observes*". Kerlinger (2000: 49) selanjutnya mengemukakan "*variabel adalah suatu simbol maupun karakteristik yang padanya kita lekatkan nilai*". Suatu variabel karena itu mesti berbeda dengan suatu konsep yang menggambarkan abstraksi maupun pengertian. Tuckman (1972: 36-37) dalam kaitannya dengan variabel bebas ia menjelaskan bahwa *The independent variable, which is a stimulus variable or input, operates either within a person or within his environment to affect his behavior. It is that factor which measured, manipulated, or selected by the experimenter to determine its relationship to an observed phenomenon.*

Tuckman (1972: 37) selanjutnya mengemukakan: *The dependent variable is that factor which is observed and measured to determine the effect of the independent variable.* Berdasarkan penjelasan variabel bebas dan terikat tersebut, dalam penelitian ini variabel bebas dan terikatnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Variabel bebas meliputi; pembelajaran multikultural (X1), pembelajaran sejarah lokal (X2), pembelajaran sejarah nasional (X3), pembelajaran sejarah global (X4), sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah integrasi bangsa (Y), yang dibagi lagi menjadi; a) interaksi antar etnis (Y1), dan b) rasa solidaritas bangsa (Y2). Penulis, setelah memahami mana variabel bebas dan terikatnya, maka secara sederhana

kedudukan variabel bebas dan terikat serta keterkaitannya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar I-1**  
**KEDUDUKAN VARIABEL BEBAS DAN TERIKAT**



**Keterangan:**

- X1 = Variabel Bebas Pembelajaran Multikultural
- X2 = Variabel Bebas Pembelajaran Sejarah Lokal
- X3 = Variabel Bebas Pembelajaran Sejarah Nasional
- X4 = Variabel Bebas Pembelajaran Sejarah Global
- Y1 = Variabel Terikat Interaksi Antar Etnis
- Y2 = Variabel Terikat Rasa Solidaritas Bangsa

**C. Definisi Operasional Variabel**

Penulis sebelum mengemukakan definisi operasional, ada baiknya sebelumnya penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian definisi konsep dan dilanjutkan dengan definisi operasional variabel. Tuckman (1972:57) menyatakan bahwa *In the conceptual definition, a concept is defined with reference to another concept rather than with reference to observable reality characteristics as is the case in an operational definition.* Definisi konsep tersebut dengan demikian menggambarkan suatu abstraksi yang menggambarkan sesuatu pengertian dengan membandingkan dengan konsep-

konsep yang lain, dan bukan dengan karakteristik yang tampak dihadapi. Penjelasan ini berbeda dengan definisi operasional variabel. Tuckman (1972: 57) mengemukakan *An operational definition is a definition based on the observable characteristics of that which is being defined*. Kesimpulannya suatu definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada karakteristik yang tampak digambarkan dalam penelitian yang dilakukan.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini secara makro terbagi dua, yaitu: *Pertama*; Definisi Operasional untuk variabel bebas mencakup: (1) pembelajaran multikultural, (2) pembelajaran sejarah lokal, (3) pembelajaran sejarah nasional, (4) pembelajaran sejarah global. Sedangkan untuk variabel terikatnya meliputi; (1) interaksi antar etnis, (2) rasa solidaritas bangsa.

Pembelajaran Multikultural, dalam definisi operasional ini adalah suatu proses “intervensi” guru dengan tujuan terjadinya proses belajar memahami dan menghargai kebudayaan sendiri dan orang lain yang berbeda-beda dalam suatu komunitas Indonesia, agar tercipta suatu kehidupan penuh pengertian/penghargaan dengan mengedepankan nilai-nilai; (1) mengenal identitas etnis/budaya sendiri dan orang lain, (2) menghormati dan rasa ingin tahu tentang etnis dan budaya lain, (3) merasa senang dan ikut memelihara perbedaan etnis/kultural sebagai bagian komunitasnya.

Pembelajaran Sejarah Lokal, dalam definisi operasional ini diartikan sebagai suatu proses “intervensi” guru membelajarkan siswa untuk memahami sejarah dari suatu “tempat” atau “*locality*” tertentu. Kajian sejarah lokal di sini adalah sejarah kota Bandung, yang meliputi topik-topik kajian: (a) tokoh pendiri kota Bandung, (b) tahun didirikannya kota Bandung, (c) Sebab dan tujuan didirikannya kota Bandung, (d) peranan kota Bandung dahulu dan sekarang.

Pembelajaran Sejarah Nasional, penulis artikan sebagai suatu proses “intervensi” guru membelajarkan siswa untuk memahami gambaran pengalaman kolektif bangsa di masa lampau yang merupakan unit geopolitik dalam mewujudkan proses-proses kehidupan bangsa dan totalitasnya. Pembahasan pembelajaran sejarah nasional ini mencakup kajian periode: (a) kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, (b) kerajaan-kerajaan Islam, (c) penjajahan Barat, (d) Pergerakan Nasional, (e) pendudukan Jepang, (f) jaman kemerdekaan, (g) Orde Lama, dan (h) Orde Baru / jaman pembangunan.

Pembelajaran Sejarah Global oleh penulis diartikan sebagai proses “intervensi” guru membelajarkan siswa untuk memahami gambaran pengalaman kolektif terhadap masalah-masalah global (internasional) yang aktual untuk membantu pemahaman dimensi proses globalisasi yang beragam manifestasinya. Elemen-elemen yang penulis kaji dalam pembahasan ini mencakup: (a) upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama antar bangsa, (b) perdamaian dunia, (c) tanggung jawab dan kerjasama kolektif yang kreatif bidang; politik, sosial-budaya, kesehatan, lingkungan, dan HAM.

Kedua, definisi operasional variabel terikat, yang mencakup: (1) interaksi antar etnis, (2) rasa solidaritas bangsa Indonesia.

Interaksi antar etnis, dalam definisi ini diartikan sebagai proses hubungan timbal balik antar etnis di Indonesia yang bermakna baik secara sukarela maupun atas dasar kewajiban yang memupuk integrasi bangsa. Aspek-aspek yang dikaji mencakup : (a) pergaulan lintas etnis di sekolah dan masyarakat, (b) penghargaan dan keingintahuan terhadap budaya sendiri dan orang lain yang berbeda di masyarakat, (c) sikap penerimaan terhadap komunitas yang heterogen.

Rasa solidaritas bangsa, dalam definisi ini memiliki arti suatu kesadaran menyangkut perasaan setia kawan dan tanggung jawab sebagai warganegara, merasa terikat satu kesatuan dengan segala kebanggaan dan kekurangannya yang

menumbuhkan kebersamaan/kerekatan emosi sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspek yang diukur mencakup: (1) rasa kesetaraan dan keadilan sebagai bangsa Indonesia (2) merasa bagian dari bangsa Indonesia dan karenanya merasa memiliki sebagai bangsa (3) mengembangkan sikap dan perilaku kebersamaan bangsa dengan menghargai perbedaan etnis, budayanya, agama, dan kedaerahannya.

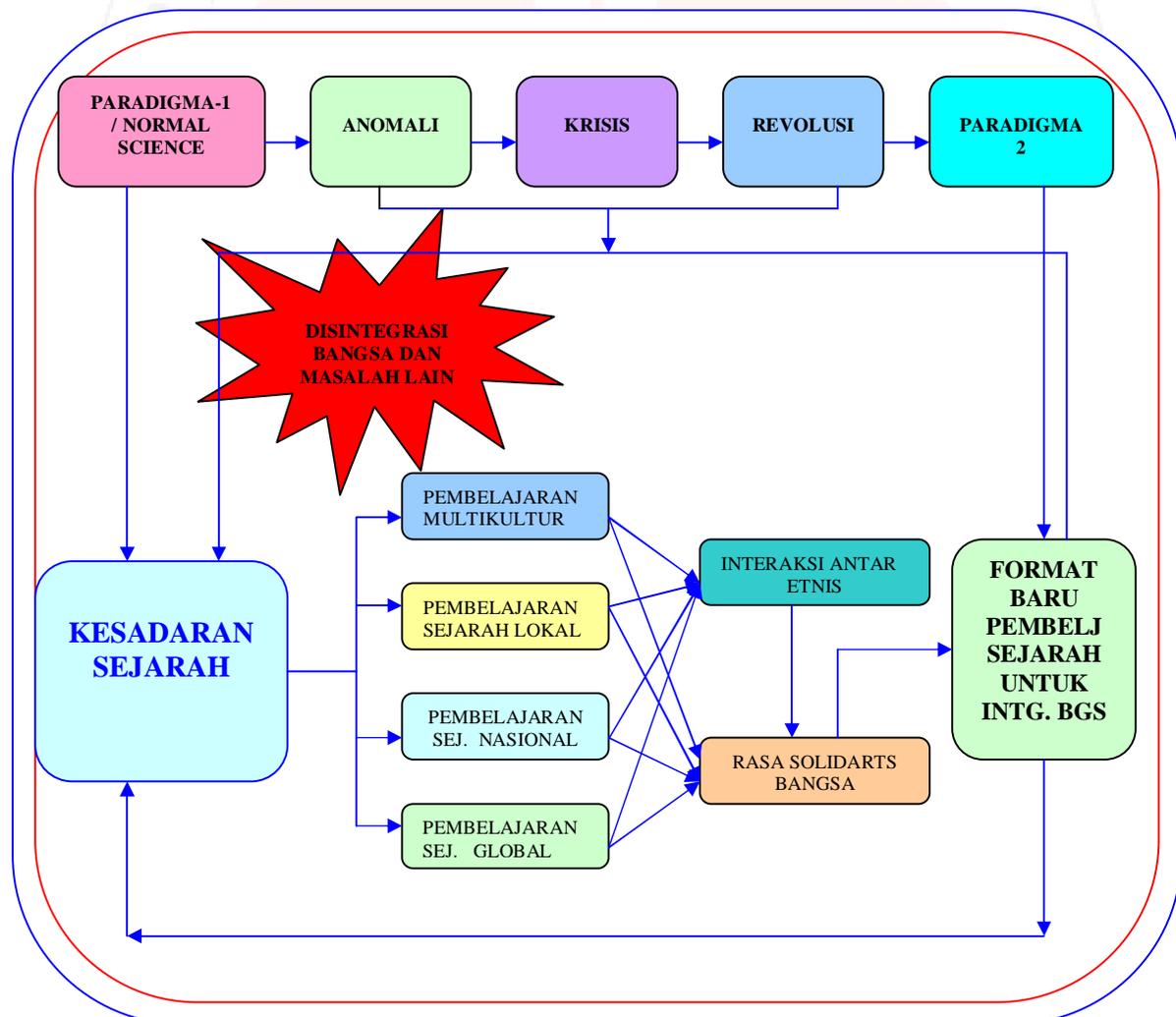
Paradigma penelitian yang penulis kembangkan jika dikaitkan dengan gugus berpikir yang dikemukakan Kuhn (1970) dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1970), dapat dikemukakan sebagai berikut: Paradigma I yang memiliki keterkaitan dengan normal sains (*nomal science*) dengan karakteristik pada tataran ini sebagai gugus berpikir di mana teori-teori keilmuan tersebut sebagai landasan berpijak dalam melakukan studi itu telah diterima secara luas. Pada tulisan ini kesadaran sejarah telah diterima secara luas sebagai puncak pencapaian studi sejarah (Namier, 1957: 375), untuk suatu pemahaman analitis-kritis mengenaiantisipasi dan introspeksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun karena terjadi anomali (penyimpangan) dengan terjadinya peristiwa-peristiwa disintegrasi bangsa yang terjadi di banyak daerah seperti di Ambon, Kalimantan Barat dan Tengah, Poso, Papua, maupun Aceh (Triardianto dan Suwardiman, 2002: 321; Sindhunata, 2000: 93-94), maka terjadilah krisis, di mana pembelajaran Sejarah Lama (*The Old History*) dipertanyakan akurasinya terutama melalui pendekatan yang monodisiplin dengan mengabaikan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti; sosiologi, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Implikasinya pembelajaran sejarah tersebut kurang berkontribusi terhadap integrasi bangsa yang dibangun secara *bottom-up*.

Krisis yang berkepanjangan menuntut adanya suatu perubahan cepat yang mendasar (revolusi) dalam pembelajaran sejarah, yakni perlunya *The New History* dengan pendekatan inter/multidisipliner yang lebih bersifat *social history* (Robinson,

1965; Burke, 1993). Dalam penelitian ini pendekatan inter/multidisipliner dilakukan melalui pembelajaran sejarah berbasis multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, serta global.

Melalui analisis jalur dalam pencarian hubungan sebab-akibat antara variabel pembelajaran multikultural, pembelajaran sejarah lokal, nasional, global terhadap interaksi antar etnis dan rasa solidaritas bangsa, maka diperoleh format baru pembelajaran sejarah yang lebih relevan dengan kebutuhan untuk integrasi bangsa. Hasil akhir penelitian ini merupakan Paradigma II sebagai temuan penelitian yang penulis lakukan, alur pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar I-2 di bawah ini:

Gambar I-2  
**PARADIGMA PENELITIAN**



## **D. Prosedur Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian:**

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi, kuantitatif-kualitatif dengan pola *the dominant-less dominant design* Creswell (1994: 177). Sedangkan metode yang peneliti pakai adalah; (1) metode kuasi eksperimen, sebagai metode dominan, dan (2) wawancara, untuk pendalaman sebagai pelengkap memperoleh informasi tambahan yang lebih kuat dan akurat.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMU di Kota Bandung sebanyak 99.053 siswa. Sampel/subyek penelitiannya adalah siswa SMU kota Bandung sebanyak 258 siswa dari 6 SMU negeri dan swasta. Jumlah sampel dalam penelitian ini dianggap representatif untuk suatu penelitian kuasi eksperimen yang dapat dijangkau berdasarkan perhitungan iterasi.

### **3. Cara Menentukan Kelompok Subjek (Sampling)**

Peneliti dalam menentukan kelompok subyek (sampel) menggunakan *purposive sampling* (penjelasan pada Bab III). Alasan peneliti mengambil jenis *purposive sampling* tersebut pertimbangannya bahwa dalam meneliti multikulturalisme maka yang diperlukan informasi bagi peneliti adalah karakteristik kemajemukan etnis dan budaya di sekolah itu. Pertimbangan tersebut menyebabkan peneliti untuk memilih/menentukan Sekolah Menengah Umum negeri maupun swasta yang heterogen siswanya.

### **4. Pengembangan Instrumen Penelitian**

Pengembangan instrumen penelitian untuk masing-masing variabel sebagai berikut: Variabel pembelajaran multikultural, pengukurannya menggunakan instrumen skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman dengan lima pilihan, yaitu: (1) TP = Tidak Pernah, (2) KK = Kadang-kadang, (3) AS = Agak

Sering, (4) S = sering, (5) U=Umumnya/Selalu. Skor yang diberikan terhadap jawaban yang benar adalah; 1, 2, 3, 4, 5 jika pernyataan mengarah ke kutub negatif. Sebaliknya diberi skor 5, 4, 3, 2, 1, jika pernyataan mengarah ke kutub positif.

Variabel pembelajaran sejarah lokal, nasional, global, digunakan tes sejarah dalam bentuk skala sikap Model Likert (Anastasi dan Urbina, 1977: 43) dengan lima kategori jawaban sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu (TT), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penentuan skor skala ini, pilihan-pilihan respons diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 dari kutub positif ataupun negatif. Jumlah kredit (skor) butir soal menggambarkan skor total individu yang harus diinterpretasikan dalam kaitannya dengan norma yang ditentukan secara empiris.

Variabel interaksi antar etnis dan rasa solidaritas (integrasi bangsa) menggunakan kembali instrumen skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman dengan lima pilihan, yaitu: (1) TP = Tidak Pernah, (2) KK = Kadang-kadang, (3) AS = Agak Sering, (4) S = sering, (5) U=Umumnya/Selalu seperti pada variabel multikultural

##### **5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Data primer, diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digunakan: Pertama; melalui angket atau kuesioner pada kegiatan pretes dan postes tentang pembelajaran multikultural, sejarah lokal, nasional, global, interaksi antar etnis, dan rasa solidaritas bangsa. Kedua; untuk memperoleh data tambahan yang lebih memperkuat tingkat kepercayaan penelitian ini juga dilengkapi terutama dengan teknik wawancara dengan siswa untuk mengungkapkan informasi-informasi yang lebih spesifik dan dibutuhkan peneliti tentang pembelajaran multikultural, sejarah lokal, nasional, global, interaksi antar etnis, dan rasa solidaritas bangsa.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan beberapa metode / strategi analisis, yang berupa:

Pertama; analisis deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran /potret yang lebih jelas tentang keadaan variable-variabel pembelajaran multikultural, sejarah lokal, nasional, global, dan integrasi bangsa yang peneliti angkat dan fokuskan sebagai kajian kuasi eksperimen. Langkah berikutnya dalam analisis deskriptif ini adalah dengan menyajikan informasi dalam bentuk tabel, grafik, ukuran gejala pusat seperti rata-rata, ukuran penyebaran varians, interval dan deviasi baku, angka maksimal, minimal, dan sebagainya.

Kedua; peneliti melakukan analisis induktif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dengan memanfaatkan teknik-teknik statistik sebagai berikut:

1. Analisis korelasi Pearson (*interval by interval*), untuk mengukur keeratan hubungan variabel X dengan Y yang datanya berskala interval.
2. Analisis regresi multiple (*multiple regression analysis*). Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih variabel independen (*exogenous*) dengan variabel dependen (*endogenous*), menilai besarnya nilai Y dari beberapa nilai X ( $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$ ).
3. Analisis Jalur (*Path Analysis*) atau metode analisis kausal. Digunakannya metode ini untuk mengetahui “pengaruh” langsung maupun tak langsung antara variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) terhadap perilaku integrasi Bangsa, yang terbagi dalam interaksi antar etnik dan rasa memiliki serta solidaritas bangsa ( $Y_1$  dan  $Y_2$ ).

## **6. Pengujian Instrumen**

Uji coba instrumen dilakukan setelah proposal disetujui oleh pembimbing, yang kemudian dengan berkonsultasi dalam pembuatan instrumen/kuesioner akhirnya

diadakan pengujian instrumen/kuesioner yang dilaksanakan di SMUN 5 Bandung, terhadap 42 siswa kelas II (Lihat Lampiran). Tujuan uji-coba ini dimaksudkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### ***1. Tujuan***

Secara umum; penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk pembelajaran sejarah yang lebih komprehensif (*historical comprehension*) yang menyangkut kajian sosial-budaya mengikuti pola Sejarah Baru (*The New History*) yang digagas Robinson (1965), Landes dan Tilly (1971), maupun Himmelfarb (1987) dengan karakteristik *Social Scientific History* dan menggunakan pendekatan interdisipliner, antara disiplin; sejarah-sosiologi-antropologi sebagai esensi karakteristiknya. Pembelajaran pola Sejarah Baru (*The New History*) ini akan sangat relevan kearah suatu model pembelajaran sejarah yang mendukung optimalisasi integrasi bangsa yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masa sekarang maupun mendatang, karena dibangun atas dasar integrasi bangsa dari bawah oleh masyarakat (*popular nations integration*) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa kini dan mendatang.

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menemukan profil tentang pembelajaran sejarah yang relevan dengan basis pendekatan multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, serta global dalam integrasi bangsa yang lebih optimal.
2. Menghasilkan suatu format baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner melalui disiplin sejarah, sosiologi, antropologi, yang diharapkan mampu

meningkatkan kualitas integrasi bangsa melalui pembelajaran sejarah yang lebih terpadu dan komprehensif.

3. Untuk menemukan efektivitas format pembelajaran sejarah berbasis multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, global tersebut, dibanding dengan pembelajaran sejarah secara konvensional..

## **2. Kegunaan**

*a. Secara teoritik;* studi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan sejarah untuk integrasi bangsa. Melalui pendekatan pembelajaran sejarah yang interdisipliner (Gutierrez, 2000; 356-372), dan bersifat konstruktivistik sosial (Kukla, 2000: 3; Matthew, 1992: 15), pembelajaran sejarah berbasis multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, serta global akan lebih komprehensif dan fleksibel serta menyentuh akar sosial budaya yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat menjadikan siswa untuk *making historical sense*. Seperti dikatakan Wineburg (2000:312), “*Each of these student grew up ... and we wanted to capture this aspect of their experiences as well... To better understand students' context for developing a historical self.* Akhirnya dengan memahami keterhubungan antara pembelajaran multikultural, sejarah lokal, nasional, dan global, maka integrasi bangsa yang dikembangkan bukan lagi jenis integrasi bangsa yang dibangun oleh paksaan, kekerasan, maupun kesadaran palsu (*false consciousness*), melainkan jenis kesadaran yang dibangun oleh integrasi bangsa dari bawah. Integrasi bangsa ini bukan sekedar datang dari “atas” oleh negara (*official nations integration* atau *imposed integration*) yang mengarah kepada *statism* atau *militarism* yang justru akan berfungsi sebagai disintegrator (Hirschman, 1970:115; Sujatmiko, 1999: 2; Prasajo, 2000: 3). Penulis percaya, melalui pembelajaran sejarah yang komprehensif dengan pendekatan interdisipliner (sejarah-antropologi-sosiologi) diharapkan dapat

memberikan pemikiran dan pencerahan baru yang lebih luas kepada guru sejarah maupun siswa sebagai insan pembelajar untuk meningkatkan kesadaran sejarah dalam integrasi bangsa. Sebagai penunjang, tulisan ini dilengkapi dengan sintesis Teori Fungsionalisme Struktural Parsons (1962: 227) dan Teori Konflik Dahrendorf (1959: 62) yang dapat diadaptasi untuk acuan teoritik integrasi bangsa Indonesia. Alasan peneliti menggunakan dua pendekatan tersebut, di samping sesuai dengan pendapat van den Berghe (1967: 294-295), juga kebutuhan untuk mensintesis kedua pendekatan tersebut bahwa keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Pendekatan fungsionalisme struktural, seperti yang dikemukakan oleh Parsons (van den Berghe, 1967; 294-295) di antaranya berasumsi bahwa: (1) Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem daripada elemen-elemen yang tidak terintegrasikan, (2) Walaupun integrasi bangsa tidak dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Namun sebaliknya, teori tersebut telah menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Lockwood (1973: 284), menganggap pendekatan Parsons itu terlalu bersifat *normatif*, padahal dalam sistem sosial tidak hanya tata tertib yang *normatif* saja, tetapi juga *substratum* yang melahirkan konflik-konflik. Keduanya saling berpadu dan bergantian dalam suatu stabilitas dan instabilitas. Setiap struktur sosial apapun akan memiliki kontradiksi-kontradiksi/konflik-konflik internal yang menjadi sumber perubahan maupun *visious circle* (lingkaran yang merekat). Begitupun perubahan sosial tidak selalu berjalan secara gradual, tetapi bisa revolusioner (van den Berghe, 1967: 297).

Pengabaian kenyataan-kenyataan di atas pendekatan fungsionalisme struktural dapat dipandang sebagai pendekatan reaksioner, dan mengabaikan realita sosial (Nasikun, 2003: 15). Faktor itulah yang mendorong penulis memerlukan pendekatan konflik, terutama non-Marxist, dengan mengikuti pola Dahrendorf (1959: 162)

mengemukakan bahwa asumsi-asumsi yang dikembangkan di antaranya bahwa (1) Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat. (2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain konflik adalah gejala melekat setiap masyarakat.

Kedua paradigma ini berpadu saling melengkapi, karena dalam struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik (Nasikun, 2003: 28). Pertama, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan etnis, agama, adat-istiadat, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan lapisan bawah dan atas secara vertikal yang cukup tajam.

*b. Secara praktis;* studi ini berguna bagi institusi pendidikan UPI, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah sebagai institusi pembina profesi guru sejarah yang mempersiapkan profesionalisasi calon guru sejarah agar lebih peka dan terbuka dalam menerima inovasi pembelajaran yang selalu berusaha meningkatkan kualitasnya dalam merespons tantangan/kebutuhan. Bagi institusi SMU, penelitian ini juga berguna sebagai *feedback* sekaligus sebagai parameter untuk mengetahui seberapa jauh pembaharuan pembelajaran sejarah di lapangan telah bergulir dan membawa hasil yang diharapkan. Bagi guru sejarah juga bermanfaat untuk mengukur seberapa jauh kesiapan guru-guru untuk memulai dan meningkatkan pembaharuannya baik yang menyangkut pemahaman strategi pembelajaran maupun substansi pembelajaran kesejarahan.

## **F. Asumsi dan Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa *optimalisasi integrasi bangsa dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran sejarah yang tinggi.*

Bertolak dari asumsi tersebut dan mengacu kepada pertanyaan penelitian yang diterakan di halaman 32, maka dapat dikemukakan sebuah hipotesis penelitian secara umum sebagai berikut: *“Hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran sejarah dengan basis pendekatan multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, serta global, ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan integrasi bangsa, dibanding dengan pembelajaran sejarah secara konvensional”*.

Untuk lebih spesifik dan jelasnya, hipotesis tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa hipotesis yang lebih khusus/rinci, sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran multikultural terhadap interaksi antar etnis.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran sejarah lokal, terhadap interaksi antar etnis.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran sejarah nasional terhadap interaksi antar etnis.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran sejarah global terhadap interaksi antar etnis.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran multikultural terhadap rasa solidaritas bangsa.
6. Terdapat pengaruh signifikan variabel pembelajaran sejarah lokal terhadap rasa solidaritas bangsa.
7. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran sejarah nasional terhadap rasa solidaritas bangsa.
8. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran sejarah global terhadap rasa solidaritas bangsa.

9. Terdapat pengaruh signifikan variabel interaksi antar etnis terhadap rasa solidaritas bangsa.

